

## **Penerapan Prinsip Value For Money Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun 2024 (Studi Pada Program Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa)**

---

Article History:

Received	: 07/05/2025
Received in revised form	: 15/05/2025
Accepted	: 14/09/2025

---

**Sri Astuti\*, Djonet Santoso, Yorry Hardayani**

Administrasi Publik, Universitas Bengkulu, Jalan W.R Supratman, Kandang Limun,  
Kecamatan Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Indonesia, 387371

\*E-mail: [sriastuty7172@gmail.com](mailto:sriastuty7172@gmail.com)

**Abstract:** Transparent, efficient, and accountable village financial management is an important element in supporting sustainable village development. This study aims to analyze the application of the value for money principle in village financial management in the clean water source development program in Air Petai Village, Sukaraja District, Seluma Regency in 2024. The value for money principle, which includes economic, efficiency, and effectiveness aspects, is used as an approach to evaluate the extent to which this program is running in accordance with the planned objectives. This study is based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 13 of 2006 concerning Guidelines for Regional Financial Management. The method used in this study is descriptive qualitative which attempts to provide a comprehensive description of the research problem. Furthermore, to strengthen the argument, the author collected data using observation, interview, and documentation methods. The research results show that in the economic aspect, the village government has implemented budget management economically and carefully, including through consultations with the community and price surveys to ensure the selection of quality materials. In the efficiency aspect, the implementation of activities is carried out in a structured manner with a mutual cooperation approach to reduce costs without sacrificing results. Meanwhile, in terms of effectiveness, the program succeeded in achieving the goal of developing clean water sources, but its use was not optimal due to limited pipes to residents' homes.

**Keywords:** Village Finance; Management; Value For Money

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Jika dibandingkan antara kota dan desa, masih ada perbedaan dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk mengatasi keadaan di atas, pemerintah memberikan bantuan kepada pemerintah desa untuk menjalankan otonomi mereka sendiri, sehingga mereka dapat menjalankan kewenangan, kewajiban, dan tugas yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Maka dari itu, pemerintah desa membutuhkan sumber pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kewenangan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, kepedulian terhadap masyarakat serta pembangunan (Rudiarta et al., 2020)

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia. Karena sebagian besar dari penduduk Indonesia tinggal di desa, maka desa menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik, peraturan umum, pemberdayaan masyarakat, dan kewenangan. Berkaitan dengan otonomi, otonomi desa yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah desa dalam mengurus dan mengelola keuangannya sendiri. Dalam Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagian dari hasil pajak daerah, dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi Dana Desa sebagai bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan sumber pendapatan desa lainnya yang sah. Dalam proses pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus selalu berkolaborasi dengan masyarakat, meskipun hanya sebagai perwakilan masyarakat.

Salah satu langkah penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa adalah pengelolaan keuangan desa yang dioptimalkan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan dana desa dialokasikan secara efektif untuk proyek pembangunan seperti infrastruktur,

pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai bagian dari sektor publik dan dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran, desa memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan good governance. Selain itu, untuk memajukan kepentingan umum, pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan tetap menjaga praktik yang sesuai peraturan, efisien, serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan Desa Air Petai merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Desa Air Petai ini berbatasan langsung dengan Kotamadya. Desa Air Petai memiliki angka Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 yang diperoleh sebesar 0,6570 dengan status berkembang (sid.kemendesa.go.id, 2023). Agrobisnis merupakan potensi sumber daya alam utama di Desa Air Petai. Pembangunan desa bertujuan untuk menciptakan kebutuhan yang dapat dipenuhi dan mensejahterakan masyarakat desa, yang berarti menyediakan sumber daya dan peluang di luar pertanian. Penggunaan dana desa juga dilakukan dengan optimal untuk pembangunan desa tanpa adanya pemborosan atau penggunaan dana yang berlebihan. Penyerapan anggaran menjadi penanda keberhasilan pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah. Suatu program dianggap berhasil secara Cost Effectiveness saat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Efisiensi dapat dinilai melalui perbandingan antara pendapatan yang tercapai dengan belanja yang terealisasi (Mahsun, 2013). Sedangkan SILPA adalah indikator efisiensi yang terbentuk ketika APBDes Surplus dan pembiayaan bersih positif terjadi ketika porsi penerimaan lebih besar dari porsi pembiayaan.

**Tabel 1.**  
**Laporan Realisasi APBDes Desa Air Petai Tahun Anggaran 2024**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Silpa 2024</b>
ADD	Rp. 365.200.448	Rp. 364.874.874	
DD	Rp. 865.858.000	Rp. 855.546.000	
Silpa ADD & DD	Rp. 16.533.074	Rp. 16.533.074	Rp. 10.637.574
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 1.247.591.522</b>	<b>Rp. 1.236.953.948</b>	

Sumber: Kantor Desa Air Petai, 2024

Berdasarkan tabel 1. diatas maka dapat diketahui bahwa total anggaran pendapatan desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan juga Silpa adalah Rp. 1.247.591.522, dengan total realisasi belanja sebesar Rp. 1.236.953.948. Sementara Silpa pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.637.572. Anggaran tersebut disalurkan untuk pembiayaan kegiatan desa di berbagai bidang.

Air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan kehidupan manusia. Mengingat pentingnya peran air minum dan sanitasi bagi kesejahteraan masyarakat, pemerintah menginisiasi program pembangunan untuk menyediakan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak. Upaya ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025. Di Desa Air Petai sendiri program pembangunan/rehabilitas/peningkatan sumber air bersih milik desa tetap menjadi salah satu program prioritas desa sejak beberapa tahun terakhir dan program ini telah dilaksanakan secara berulang.

Program ini telah menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan akses air bersih. Pada tahun 2017, program ini berhasil dilaksanakan di tiga dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, dan Dusun 3, sementara pada tahun 2016, program serupa telah dilakukan di salah satu tempat ibadah yaitu di Pura Tirta Sari Nugraha. Pada tahun 2024, program ini direncanakan kembali dilaksanakan di dua titik utama, yaitu Dusun 1 dan Dusun 2, untuk memastikan keberlanjutan akses air bersih bagi masyarakat desa. Namun, disamping itu pelaksanaan program yang berulang menimbulkan pertanyaan apakah yang digunakan efektif dan efisien, dan apakah program ini sudah benar-benar memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat.

Melalui program pembangunan/rehabilitas/peningkatan sumber air bersih, Peneliti tertarik untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa Pemerintah Desa Air Petai. Pendekatan Value for Money (VfM) memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap efisiensi, efektivitas, dan ekonomi program ini. Hal ini mencakup bagaimana anggaran direncanakan dan digunakan, apakah bahan dan jasa diperoleh secara ekonomis, apakah hasil rehabilitasi sesuai tujuan, serta bagaimana manfaat dari program ini dirasakan oleh masyarakat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran publik untuk memastikan keberlanjutan dan optimalisasi dampak program di masa depan.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kualitatif deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di mana penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan uraian serta menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci mengenai permasalahan yang diteliti, yaitu penerapan prinsip value for money dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan melalui program atau kegiatan pembangunan sumber air bersih milik desa di Desa Air Petai, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang mana menekankan pada manusia sebagai instrumen utama penelitian serta hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Informan penelitian sebanyak 8 orang yang terdiri dari 6 orang Pemerintah Desa dan 2 orang tokoh masyarakat dalam hal ini sebagai penerima manfaat. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen. Aspek dalam penelitian ini berujuk pada pengelolaan keuangan desa menggunakan konsep value for money menurut Mardiasmo. Value for money merupakan suatu konsep yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang didasari pada tiga aspek utama yang saling berhubungan yaitu; ekonomi, efisien, dan efektivitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait upaya Pemerintah Desa Air Petai dalam pengelolaan keuangan desa pada program pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih milik desa, dengan berdasarkan pada prinsip value for money, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan secara rinci sesuai dengan masing-masing indikator.

### ***Ekonomi***

Ekonomi sebagaimana yang dimaksud merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah. Artinya belanja desa harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehematan, tanpa mengurangi kualitas program atau kegiatan. Menurut Mardiasmo suatu kegiatan operasional dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu (Rusydah & Mildawati, 2016)

Aspek ekonomi menitikberatkan pada perencanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa. Pada tahap perencanaan anggaran, ekonomi diukur melalui kesesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan kebutuhan asli desa, serta perbandingan

anggaran yang diusulkan dengan harga pasar bahan atau material yang dibutuhkan. Dalam pengadaan barang/jasa, ekonomi tercermin dari kemampuan desa memilih penyedia barang atau jasa dengan harga terendah, tanpa mengorbankan kualitas yang dibutuhkan. Dengan kata lain, desa harus mampu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Pada proses perencanaan anggaran desa untuk kegiatan pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih milik desa di desa Air Petai, pemerintah desa mengedepankan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) untuk menjaring aspirasi dan menentukan prioritas kebutuhan. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa dan kebutuhan prioritas seperti sanitasi air bersih,

Selanjutnya, terdapat strategi yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran untuk menghindari pemborosan. Salah satu strategi utama adalah pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam pembahasan tersebut, ditentukan besaran anggaran yang sesuai kebutuhan. Selanjutnya, Dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) desa, digunakan standar satuan harga kabupaten sebagai ambang batas atau harga maksimal. Namun, penyesuaian tetap dilakukan berdasarkan hasil survei harga di toko agar anggaran lebih realistis dan tidak terjadi pembengkakan biaya.

Proses perencanaan anggaran di Desa Air Petai telah mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi dalam pelaksanaannya. Tahapan yang partisipatif, berbasis kebutuhan, dan didukung dengan strategi pengelolaan anggaran yang rasional, menunjukkan bahwa anggaran desa disusun untuk mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/jasa, ekonomi tercermin dari kemampuan desa memilih penyedia barang atau jasa dengan harga terendah, tanpa mengorbankan kualitas yang dibutuhkan. Dengan kata lain, desa harus mampu memaksimalkan penggunaan anggaran untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis di lapangan, bahwa pada proses pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih milik desa di desa Air Petai dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, salah satunya sesuai dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan dimulai dengan perencanaan yang meliputi identifikasi kebutuhan barang/jasa, diikuti dengan survei harga di beberapa toko atau

rekanan. Hasil survei harga digunakan untuk membandingkan harga dan kualitas barang yang diperlukan dalam pembangunan desa. Pemilihan penyedia barang/jasa tidak hanya didasarkan pada harga terendah, tetapi juga pada kelengkapan administrasi dan kualitas material yang ditawarkan. Kriteria ini penting agar barang yang diperoleh memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Dalam memilih penyedia, Pemerintah Desa Air Petai juga mempertimbangkan apakah penyedia dapat memenuhi kebutuhan barang secara lengkap, bukan sekadar menawarkan harga murah. Hal ini untuk menghindari masalah di kemudian hari yang disebabkan oleh material yang tidak memenuhi standar. Selain itu, pemilihan barang juga memperhatikan kualitas, seperti menggunakan semen tipe 1 dan pipa kelas 1 untuk memastikan keberlanjutan proyek, terutama dalam pembangunan atau rehabilitasi sumber air bersih yang menjadi prioritas desa.

Pemerintah Desa Air Petai menunjukkan upaya hemat dan cermat dalam pengalokasian anggaran melalui survei harga di beberapa toko sebelum melakukan pengadaan barang atau jasa. Dengan membandingkan harga dari tiga toko yang berbeda, mereka dapat memilih harga yang paling sesuai dengan kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas. Selain itu, dalam pengadaan barang/jasa, mereka juga memastikan kelengkapan administrasi dari penyedia, yang menghindari potensi pemborosan akibat penyedia yang tidak dapat memenuhi kewajiban administratif.

### **Efisien**

Efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya yang berarti menggunakan input serendah-rendahnya dan dengan usaha yang minimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Suatu proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila dapat mencapai suatu produk atau hasil kerja tertentu tanpa sumber daya dan pendanaan yang berlebihan (perencanaan pengeluaran yang memadai).

Aspek efisiensi berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan upaya penghematan anggaran. Efisiensi dalam pelaksanaan anggaran diukur dari penggunaan sumber daya, seperti tenaga kerja dan waktu, yang digunakan secara efektif untuk mencapai output yang diharapkan. Pengelolaan keuangan yang efisien ditandai oleh pengurangan biaya yang tidak perlu, tanpa mengurangi kualitas atau kuantitas output yang dihasilkan. Dalam konteks ini, efisiensi menuntut pengelola keuangan desa untuk bekerja lebih cerdas dan mengurangi pemborosan, sehingga anggaran desa dapat digunakan seoptimal mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Pemerintah Desa Air Petai, bahwa pada pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih milik desa dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Setelah dana masuk ke rekening desa, pelaksanaan dimulai dengan penyusunan Surat Permintaan Pencairan (SPP) yang diajukan untuk verifikasi oleh Kepala Desa. Proses pencairan dana dilakukan setelah disetujui oleh kepala desa. Sebelum pekerjaan dimulai, dilakukan musyawarah pra-kegiatan untuk memastikan kelengkapan administrasi dan penentuan tenaga kerja dimana yang diutamakan merupakan warga desa disekitar pembangunan atau masyarakat penerima mandat. Kegiatan dimulai dengan seremoni titik nol yang melibatkan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat setempat, untuk menandai dimulainya pembangunan.

Seluruh tahapan pembangunan, mulai dari persiapan hingga penyelesaian, dilakukan dengan ketepatan jadwal dan prosedur yang jelas. Proses pengawasan juga diterapkan dengan ketat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), untuk memastikan kecocokan antara material yang diterima dengan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan. Pengawasan volume material dan kualitas barang juga dilakukan dengan cermat untuk menjaga kesesuaian antara yang diterima dan yang dipesan, guna menghindari kekurangan material yang dapat menghambat jalannya proyek.

Selama pelaksanaan, tidak ditemukan adanya pemborosan sumber daya. Karena sebelum kegiatan, pemerintah desa sudah melakukan perencanaan yang matang dan sesuai prosedur. Dengan demikian, kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Air Petai tidak hanya sesuai dengan rencana, tetapi juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Upaya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah desa Air Petai dalam kegiatan pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih milik desa mencakup berbagai strategi untuk memastikan penggunaan sumber daya keuangan secara efisien tanpa mengurangi kualitas dan tujuan program pembangunan. Salah satu strategi utama adalah memanfaatkan sistem gotong royong pipanisasi dalam kegiatan pembangunan sumur bor untuk mengurangi biaya yang tidak dianggarkan. Langkah ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat, yang secara langsung berkontribusi pada penghematan anggaran.

Selain itu, efisiensi harga barang dan material juga menjadi fokus dalam strategi penghematan anggaran. Dana yang berhasil dihemat tidak langsung digunakan pada tahun berjalan, tetapi dimasukkan dalam SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dan dapat dialokasikan pada APBDes perubahan untuk mendukung kebutuhan di masa mendatang. Strategi ini tidak hanya mengurangi potensi pemborosan, tetapi juga memastikan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang efisien ini membantu meningkatkan efektivitas anggaran dan mendukung keberhasilan program pembangunan desa

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan keterkaitan antara output dengan target yang telah ditentukan. Dengan kata lain, efektivitas adalah sejauh mana tingkat keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu kegiatan operasional dikatakan efektif (berhasil guna) jika proses kegiatannya mencapai tujuan akhir dari kebijakan tersebut.

Aspek efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan anggaran dan pemanfaatan output yang dihasilkan. Efektivitas diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran tercapai, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan atau infrastruktur desa. Selain itu, efektivitas juga terlihat dari seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa dari penggunaan anggaran tersebut, misalnya melalui peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh desa. Dengan demikian, efektivitas memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan desa.

Pencapaian tujuan anggaran dalam program pembangunan dan peningkatan sumber air bersih di Desa Air Petai dinilai berhasil. Hal ini terlihat dari kebermanfaatan sumur bor yang telah dibangun dan dapat digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Evaluasi keberhasilan program dilakukan dengan mempertimbangkan asas manfaat bagi warga desa serta keberlanjutan infrastruktur yang dibangun. Selain itu, pemerintah desa juga melakukan pengamatan berkelanjutan terhadap penggunaan sumur bor untuk memastikan manfaatnya tetap optimal.

Pemanfaatan output adalah proses memastikan bahwa hasil dari suatu program, kegiatan, atau proyek dapat digunakan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan desa, pemanfaatan output mencakup

penggunaan hasil pembangunan, seperti infrastruktur atau fasilitas, oleh masyarakat yang menjadi sasaran program. Hal ini melibatkan pemeliharaan, pengelolaan, dan pengawasan agar output tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Pemanfaatan yang baik juga mencakup pengukuran dampak positif yang dihasilkan, seperti akses yang lebih mudah terhadap fasilitas, atau efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara, hambatan utama yang dihadapi masyarakat Desa Air Petai dalam penggunaan sumber air bersih adalah ketiadaan pipanisasi yang menghubungkan sumur bor ke rumah-rumah warga. Meskipun sumber air bersih dari sumur bor tersedia dan mudah diakses, masyarakat harus menyediakan pipa atau selang sendiri untuk memanfaatkan air tersebut, yang dapat menjadi beban tambahan bagi mereka. Selain itu berdasarkan pengamatan dilapangan, penggunaan sumur bor ini belum sepenuhnya optimal, dengan jumlah penerima manfaat, yaitu sekitar 10 kepala keluarga (KK) serta satu tempat ibadah (Pura) untuk sumbur bor di dusun 1, untuk saat ini baru 3 kepala keluarga yang aktif menggunakan dan 11 Kepala Keluarga (KK) sumur bor dusun 2, untuk saat ini baru 2 kepala keluarga yang aktif menggunakan. Meski demikian, infrastruktur yang ada masih cukup membantu warga yang berada di sekitar lokasi sumur bor.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasa tentang penerapan prinsip value For money dalam pengelolaan keuangan desa pada program pembangunan/rehab/peningkatan sumber air bersih milik desa di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa: Pada aspek ekonomi, Pemerintah Desa Air Petai telah melaksanakan hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumberdaya. Alokasi sumberdaya atau perencanaan anggaran dilaksanakan secara musyawarah bersama dengan masyarakat dan BPD untuk mentukan prioritas kebutuhan pembangunan. Dalam pengadaan barang/jasa, pemerintah desa menerapkan langkah-langkah strategis seperti survei harga dari berbagai penyedia dan pemilihan berdasarkan kelengkapan administrasi serta kualitas material. Pada aspek efisien, Pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber air bersih di Desa Air Petai telah dilaksanakan secara terstruktur dengan pengawasan yang ketat tanpa adanya pemborosan sumber daya, pembangunan dilakukan secara swakelola dan gotong royong untuk mengurangi biaya. Pada aspek efektivitas, Pemerintah Desa Air Petai telah berhasil mencapai tujuan anggaran yaitu membangun sumber air bersih dan telah dapat digunakan oleh masyarakat yang

membutuhkan, keberlanjutan dalam perawatan sumber air bersih juga telah melibatkan masyarakat. Namun penggunaan sumur bor ini belum sepenuhnya optimal

### Saran

1. Pemerintah desa dapat meningkatkan akurasi estimasi biaya dengan memperluas sumber informasi harga dan tren pasar.
2. Pemerintah desa perlu mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan fasilitas air bersih serta pentingnya menjaga keberlanjutannya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab bersama.
3. Pemerintah desa perlu melakukan evaluasi mendalam pada tahap pasca-pembangunan untuk memastikan kebermanfaatan output dan keberlanjutan program.
4. Merancang dan melaksanakan program pipanisasi agar air bersih dapat terdistribusi secara merata ke seluruh masyarakat. Pemerintah desa dapat mengajukan dukungan dari pemerintah kabupaten atau memanfaatkan alokasi dana desa.

### DAFTAR RUJUKAN

- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Ayu, L., Ramadhani, W., (2022). Analisa Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money Pada BLUD Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong. *Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(2), 2723-6951. <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>
- Fatma, E., Tantri, Y., & Pradani, G. D. (2022). Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Karangtinto Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban Melalui Pendekatan Value For Money. *Jurnal Sustainable*, 02(2). <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/sustainable/index>
- Halim, A. (2012). Pengelolaan Keuangan Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Kambey, E. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. *JURNAL EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 11.
- Magfiroh, N. (2020). Analisis Penerapan Pengukuran Value For Money Pada APBDES Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. *Universitas Bhayangkara Surabaya*. 4(1), 1–23.
- Mardiasmo (2018). Akuntansi Sektor Publik. ed terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36763>

- Rahman, W. A. (2021). Analisis Value For Money Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau <https://repository.uir.ac.id/5957/>
- Rahayu, S. (2018). Penerapan konsep value for money dalam menilai kinerja pelayanan sektor publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Pinrang. [https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4849-Full\\_Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/4849-Full_Text.pdf)
- Rudiarta, I. K. G., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 63–67. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1619.63-67>
- Rusydah, A. L., & Mildawati, T. (2016). Penerapan Konsep Value for Money Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5.
- Saraswati, E. (2018). Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Daerah. Simposium Nasional Keuangan Negara, 1(1), 1021–2045.
- Septariani, J. (2017). Penerapan Konsep Value For Money Pada Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Good Government Governance (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik) Pada Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/1169/0>
- Shole, C & Rochansjah H. (2014) *Pengelolaan Keuangan Desa*. FOKUSMEDIA. Bandung
- Sulaeman, A. S., Hamzah, A. P., & Priyanto, R. (2012). Penyerapan Anggaran Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal BPPK*, 4, 20–37.
- Zai, A. A. J., & Marpaung, P. (2022). Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia. *Jurnal Governance Opinion*, 7(2), Hlm 3. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/view/2415%0Ahttps://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/governanceopinion/article/download/2415/2178>